

Paradoks *Blue Economy* di Laut Tiongkok Selatan: Ketika Potensi Kelautan Terjebak Konflik Geopolitik

Muhammad Iqbal^{1*}, Nefra Firdaus², Yuniar³, Harri Dolli Hutabarat⁴, Lukman Yudho⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: muhammadiqbal00759@gmail.com^{1*} nefra.firdaus@idu.ac.id² yuniar@idu.ac.id³
harri.dolli@idu.ac.id⁴ lukman.prakoso@idu.ac.id⁵

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received : 28 August, 2026

Revised : 29 August, 2026

Accepted : 30 August, 2026

Kata Kunci:

Blue economy;
ekosistem laut;
geopolitik;
keamanan maritim;
Laut Natuna Utara;
Laut Tiongkok Selatan;
perikanan;
IUU fishing.

ABSTRAK

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan strategis yang menopang perikanan, konektivitas perdagangan, ketahanan pangan, sumber daya energi, dan keanekaragaman hayati laut bagi negara-negara pesisir Asia Tenggara. Namun, potensi tersebut dihadapkan pada paradoks *Blue economy*: agenda pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan berlangsung dalam kondisi klaim yurisdiksi yang bertumpang tindih, kompetisi geopolitik, sekuritisasi aktivitas perikanan, serta degradasi ekosistem. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara geopolitik, keamanan maritim, ekonomi perikanan, dan ekosistem laut di Laut Tiongkok Selatan, serta menelaah implikasinya bagi Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Penelitian menggunakan studi pustaka terstruktur dengan pendekatan *directed qualitative content analysis* dan sintesis tematik. Protokol pencarian mengacu pada prinsip PRISMA 2020 dan PRISMA-S, dengan sumber utama berupa artikel peer-reviewed ber-DOI, dokumen hukum internasional, laporan kelembagaan, dan bukti kejadian kontemporer selama 2021–Agustus 2026. Analisis dilakukan melalui kategorisasi geopolitik, keamanan maritim, *Blue economy*, ekosistem laut, dan tata kelola. Hasil sintesis menghasilkan empat tema utama, yaitu sekuritisasi ruang tangkap, kerentanan ekonomi nelayan, kompetisi sumber daya dan degradasi ekosistem, serta umpan balik antara kelangkaan sumber daya dan konflik. Temuan menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak bekerja secara langsung terhadap ekosistem, melainkan melalui pembatasan akses ruang tangkap, tindakan keamanan koersif, ketidakpastian yurisdiksi, kompetisi armada perikanan, IUU fishing, dan lemahnya kerja sama lintas batas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko ekonomi bagi nelayan kecil dan menghambat pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan ekonomi biru di Laut Tiongkok Selatan memerlukan keamanan maritim berbasis hukum, pengawasan perikanan yang adil, perlindungan nelayan, pertukaran data stok ikan, konservasi lintas batas, serta kerja sama regional berdasarkan prinsip *without prejudice* terhadap klaim kedaulatan.

PENDAHULUAN

Blue economy berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menghubungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan ekosistem. Dalam pengertian idealnya, *Blue economy* tidak sekadar mendorong peningkatan produksi perikanan atau eksploitasi sumber daya laut, tetapi menuntut keseimbangan antara nilai ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Namun, konsep *Blue economy* memiliki interpretasi yang beragam dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara, terutama ketika laut dipandang sebagai ruang strategis bagi sumber daya, perdagangan, keamanan, dan proyeksi kekuatan. Voyer et al. (2018) menunjukkan bahwa *Blue economy* dapat mengandung perbedaan orientasi antara pembangunan ekonomi, konservasi ekosistem, dan tata kelola laut. Dalam konteks Tiongkok, Fabinyi et al. (2021) menilai *Blue economy* juga dapat berfungsi sebagai proyek modernisasi negara yang berkaitan dengan agenda pembangunan, keamanan, dan pengaruh maritim.

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang memperlihatkan ketegangan antara ideal *Blue economy* dan realitas geopolitik. Perairan ini memiliki arti penting bagi perikanan, perdagangan laut, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian masyarakat pesisir di Asia Tenggara. Teh et al. (2017) memperkirakan bahwa perikanan Laut Tiongkok Selatan menghasilkan sekitar 11–17 juta ton tangkapan per tahun pada periode kajiannya, dengan nilai sekitar US\$12–22 miliar dan dukungan terhadap hampir tiga juta pekerjaan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perikanan kawasan ini menghadapi eksploitasi berlebih, lemahnya tata kelola lintas negara, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas sumber daya.

Tekanan terhadap sumber daya perikanan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga ekonomi dan politik. Pauly dan Liang (2020) menunjukkan bahwa tangkapan perikanan Laut Tiongkok Selatan meningkat cepat hingga mencapai sekitar 10 juta ton per tahun pada akhir abad ke-20, tetapi kemudian mengalami stagnasi meskipun upaya penangkapan terus meningkat. Studi tersebut juga menemukan kecenderungan *fishing down*, yaitu pergeseran hasil tangkapan menuju spesies berukuran lebih kecil dan berperingkat trofik lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas penangkapan tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi perikanan yang berkelanjutan, terutama ketika stok ikan dan habitat laut berada di bawah tekanan tinggi.

Persoalan tersebut diperumit oleh tumpang tindih klaim maritim, kompetisi geopolitik, dan ketidakpastian yurisdiksi di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa tidak hanya berkaitan dengan fitur daratan seperti Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan Scarborough Shoal, tetapi juga menyangkut akses terhadap sumber daya hayati, hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif, jalur pelayaran, dan kewenangan penegakan hukum di laut. Putusan Tribunal Arbitrase Laut Tiongkok Selatan pada 12 Juli 2016 merupakan rujukan hukum penting dalam penafsiran *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) terkait klaim atas sumber daya laut. Namun, putusan tersebut tidak menyelesaikan seluruh sengketa kedaulatan atas fitur daratan dan tidak mengakhiri perbedaan posisi politik para pihak. Tiongkok juga menyatakan tidak menerima dan tidak berpartisipasi dalam proses arbitrase tersebut.

Dalam lima tahun terakhir, hubungan antara geopolitik, keamanan maritim, dan aktivitas perikanan terlihat melalui sejumlah kejadian konkret. Pada Maret 2021, Filipina melaporkan lebih dari 220 kapal Tiongkok berada di Whitsun Reef. Pemantauan berbasis citra satelit kemudian menunjukkan keberlanjutan kehadiran kapal milisi maritim di sejumlah area Kepulauan Spratly sepanjang 2021–2022. Pada Desember 2023, kapal-kapal yang menjalankan misi dukungan bagi nelayan Filipina di sekitar Scarborough

Shoal dilaporkan mengalami penggunaan *water cannon*, termasuk kerusakan peralatan komunikasi dan navigasi pada salah satu kapal. Filipina dan Tiongkok menyampaikan penjelasan hukum yang berbeda atas kejadian tersebut, tetapi insiden itu menunjukkan bahwa aktivitas perikanan sipil telah berada dalam ruang risiko keamanan yang tinggi.

Tekanan keamanan terhadap aktivitas ekonomi perikanan juga memiliki konsekuensi yang dapat diukur. Ahn dan Pomeroy (2024), melalui analisis aktivitas armada perikanan jarak jauh dan data nelayan skala kecil di Laut Tiongkok Selatan, menemukan bahwa kenaikan 1% aktivitas armada jarak jauh Tiongkok berhubungan dengan penurunan hasil tangkapan nelayan kecil sebesar 0,10% di Indonesia, 0,05% di Malaysia, 0,01% di Filipina, dan 0,04% di Vietnam. Meskipun hubungan tersebut tidak meniadakan pengaruh faktor lain seperti musim, cuaca, harga ikan, kapasitas armada, dan kebijakan nasional, temuan itu menunjukkan bahwa kompetisi armada berkapasitas besar memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap nelayan lokal.

Bagi Indonesia, persoalan tersebut relevan terutama di Laut Natuna Utara. Indonesia bukan pengklaim utama atas fitur daratan di Spratly maupun Paracel, tetapi memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan UNCLOS. Laut Natuna Utara memiliki arti penting bagi perikanan, perlindungan nelayan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pesisir, dan keamanan maritim nasional. Penindakan terhadap kapal pelanggar perikanan menunjukkan bahwa *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing dan pelanggaran aturan perikanan masih menjadi persoalan nyata. Sepanjang 2025, Indonesia dilaporkan menindak 41 kapal yang melakukan pelanggaran perikanan di Laut Natuna Utara, terdiri atas 35 kapal Indonesia, lima kapal Vietnam, dan satu kapal Malaysia.

Berbagai studi terdahulu telah membahas konflik Laut Tiongkok Selatan dari sudut hukum internasional, strategi keamanan, perikanan, atau lingkungan secara terpisah. Artikel ini menjembatani dimensi-dimensi tersebut melalui analisis hubungan geopolitik, keamanan maritim, ekonomi biru, dan ekosistem laut. Dengan menggunakan studi pustaka terstruktur, analisis isi kualitatif terarah, dan sintesis tematik, penelitian ini menganalisis sumber ilmiah serta bukti kejadian yang relevan dalam periode 2021–Agustus 2026.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana konflik geopolitik dan sekuritisasi ruang laut memengaruhi aktivitas ekonomi perikanan; (2) menganalisis dampak kompetisi armada, *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing, dan ketidakpastian akses terhadap keberlanjutan ekosistem; (3) menjelaskan umpan balik antara kelangkaan sumber daya dan meningkatnya konflik; serta (4) merumuskan implikasi kebijakan bagi Indonesia, khususnya dalam perlindungan Laut Natuna Utara dan penguatan diplomasi kelautan berbasis ASEAN serta UNCLOS.

Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa *Blue economy* di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dipahami hanya sebagai agenda pembangunan ekonomi kelautan. *Blue economy* di kawasan ini merupakan persoalan tata kelola sumber daya bersama yang terikat pada konflik yurisdiksi, keamanan maritim, ketimpangan kapasitas armada, dan keberlanjutan ekosistem. Tanpa kerja sama perikanan, pertukaran data, perlindungan nelayan, konservasi lintas batas, dan mekanisme pencegahan insiden, potensi laut yang besar dapat berubah menjadi sumber kerentanan ekonomi, degradasi ekologis, dan eskalasi konflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka terstruktur dengan analisis isi kualitatif terarah (*directed qualitative content analysis*) dan sintesis tematik. Pendekatan ini

digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara geopolitik, keamanan maritim, ekonomi perikanan, dan ekosistem laut. Analisis isi digunakan untuk mengode bukti dalam literatur, sedangkan sintesis tematik digunakan untuk membangun tema analitis dan menjelaskan mekanisme sebab-akibat antarelemen.

Protokol pencarian disusun mengacu pada prinsip PRISMA 2020 dan PRISMA-S, terutama terkait transparansi sumber, strategi pencarian, batasan waktu, dan dokumentasi proses seleksi. Page et al. (2021) menyediakan pedoman pelaporan systematic review, sementara PRISMA-S menurut Rethlefsen et al. (2021) menekankan pentingnya pelaporan strategi penelusuran secara rinci agar dapat direplikasi.

Sumber ilmiah diprioritaskan dari artikel *peer-reviewed* ber-DOI yang membahas Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna Utara, perikanan, IUU fishing, ekonomi biru, keamanan maritim, ekosistem, dan konflik geopolitik. Rentang bukti kejadian kontemporer dibatasi pada 2021 hingga Agustus 2026. Literatur sebelum 2021 tetap digunakan secara selektif sebagai landasan untuk menjelaskan tren historis konsep ekonomi biru. Strategi pencarian yang dapat direplikasi menggunakan struktur berikut: (*"South China Sea" OR "West Philippine Sea" OR "North Natuna Sea" OR "Laut Natuna Utara" OR Spratly OR Paracel OR "Scarborough Shoal"*) AND (*geopolitic* OR "maritime security" OR "maritime dispute*" OR "coast guard" OR "maritime militia" OR "gray zone" OR "grey zone"*) AND (*"blue economy" OR fisher* OR fishery OR "illegal fishing" OR IUU OR ecosystem* OR "coral reef*" OR "marine conservation"*)

Sumber yang lolos verifikasi dianalisis secara tematik ke dalam beberapa kategori utama, yaitu geopolitik, keamanan maritim, ekonomi biru, ekosistem laut, dan tata kelola. Kategorisasi ini disusun secara deduktif berdasarkan model konseptual penelitian yang memetakan hubungan geopolitik → keamanan → ekonomi → ekosistem, serta secara induktif untuk menangkap tema-tema baru yang muncul dari data.

Tabel 1. Kategori dan Indikator Analisis Tematik

Kategori	Fokus analisis	Contoh kode atau indikator
Geopolitik	Perebutan ruang, yurisdiksi, dan sumber daya	Klaim maritim, ZEE, sengketa Spratly, Scarborough Shoal, kompetisi kekuatan
Keamanan maritim	Tindakan keamanan dan risiko konflik di laut	Coast guard, patroli, water cannon, tabrakan kapal, milisi maritim, <i>gray zone</i>
Ekonomi biru	Dampak terhadap kegiatan ekonomi kelautan dan masyarakat pesisir	Akses wilayah tangkap, pendapatan nelayan, hasil tangkapan, biaya bahan bakar, investasi
Ekosistem laut	Dampak terhadap keberlanjutan sumber daya dan habitat laut	Overfishing, IUU fishing, stok ikan, terumbu karang, aliran larva, biodiversitas
Tata kelola	Respons kelembagaan dan peluang kerja sama	UNCLOS, ASEAN, DOC, pertukaran data, konservasi, kuota, pengawasan terpadu

(Sumber: diolah penulis, 2026)

Hasil analisis tematik disintesis menjadi empat tema meliputi; sekuritisasi ruang tangkap, kerentanan ekonomi nelayan, kompetisi sumber daya dan degradasi ekosistem dan umpan balik antara kelangkaan sumber daya dan konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sintetis Tematik

Berdasarkan analisis isi kualitatif terarah dan sintesis tematik, ditemukan empat tema utama, yaitu: (1) sekuritisasi ruang tangkap; (2) kerentanan ekonomi nelayan; (3) kompetisi sumber daya dan degradasi ekosistem; serta (4) umpan balik antara kelangkaan sumber daya dan konflik. Keempat tema tersebut menunjukkan bahwa paradoks *blue economy* di Laut Tiongkok Selatan tidak hanya disebabkan oleh konflik

klaim maritim, tetapi juga oleh keterkaitan antara tata kelola sumber daya yang lemah, keamanan maritim yang kompetitif, ketimpangan kapasitas armada perikanan, dan tekanan ekologis yang meningkat.

Tabel 2. Tema Hasil Analisis dan Dasar Bukti

Tema	Sumber Akademik	Kategori analisis	Bukti utama	Mekanisme yang dijelaskan
Sekuritisasi ruang tangkap	Govella (2023) menjelaskan empat mekanisme yang membuat nelayan dan regulasi perikanan berada di garis depan strategi <i>hybrid</i> atau <i>gray zone</i> dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.	Geopolitik dan keamanan maritim	Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) menggunakan citra satelit untuk memantau keberadaan kapal di Whitsun Reef dan Kepulauan Spratly. Analisis 2021–2022 mencatat ratusan kapal milisi maritim dan sekitar 100–150 kapal di Union Banks.	Klaim maritim mendorong kehadiran coast guard, kapal perikanan, dan kapal milisi maritim
Kerentanan ekonomi nelayan	Ahn dan Pomeroy (2024) menganalisis dampak aktivitas armada perikanan jarak jauh terhadap nelayan skala kecil di Laut Tiongkok Selatan. Studi tersebut menemukan hubungan negatif yang signifikan antara aktivitas armada jarak jauh dan hasil tangkapan nelayan kecil.	Keamanan maritim dan <i>blue economy</i>	<i>National Task Force–West Philippine Sea</i> melalui Philippine News Agency mendokumentasikan insiden Desember 2023 terhadap kapal <i>Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Filipina</i> yang memberikan dukungan kepada nelayan.	Konflik membatasi akses, mengganggu logistik, meningkatkan risiko, dan memperbesar biaya operasi
Kompetisi sumber daya dan degradasi ekosistem	Teh et al (2017) membahas eksploitasi berlebih, nilai ekonomi perikanan, pekerjaan, serta lemahnya tata kelola perikanan Laut Tiongkok Selatan. Pauly dan Liang (2020) menganalisis tren tangkapan 1950–2014 dan menemukan stagnasi tangkapan serta gejala <i>fishing down</i> . Wolanski et al (2020) memodelkan dampak reklamasi dan overfishing terhadap konektivitas larva.	<i>blue economy</i> dan ekosistem laut	KKP mendokumentasikan penindakan terhadap 147 kapal perikanan ilegal di Kepulauan Riau dan Laut Natuna Utara selama 2020–2025; terdiri atas 85 kapal Indonesia dan 62 kapal asing.	Penangkapan berlebih, IUU fishing, dan kerusakan habitat mengurangi produktivitas perikanan
Umpan balik kelangkaan dan konflik	Govella (2023) menunjukkan bahwa krisis perikanan Laut Tiongkok Selatan muncul	Geopolitik, keamanan, ekonomi,	<i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea ASEAN–Tiongkok</i>	Kelangkaan ikan mendorong ekspansi ruang tangkap dan memperbesar risiko

	dari interaksi faktor ekonomi, politik, keamanan, dan kejahatan perikanan. Teh et al. (2017) menekankan bahwa kerja sama antarnegara dibutuhkan untuk mengatasi dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari ketidakberlanjutan perikanan. Hsiao (2020) dan Zhang (2018) menawarkan pilihan kerja sama perikanan serta mekanisme penegakan hukum sementara.	dan ekosistem	memuat bidang kerja sama berupa perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah, keselamatan navigasi, pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan kejahatan lintas negara.	konflik di wilayah sengketa
--	--	---------------	---	-----------------------------

(Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan Sumber yang lolos verifikasi Govella (2023); Ahn dan Pomeroy (2024); Teh et al. (2017); Wolanski et al. (2020); Zhang (2018) dan Hsiao (2020))

Tema umpan balik antara kelangkaan sumber daya dan konflik merupakan hasil sintesis dari studi mengenai penurunan stok ikan, kompetisi perikanan, sekuritisasi ruang laut, dan tata kelola regional. Literatur menunjukkan bahwa degradasi sumber daya menciptakan insentif untuk memperluas wilayah tangkap, sedangkan sengketa yurisdiksi dan lemahnya kerja sama dapat memperbesar risiko interaksi koersif di laut. Namun, hubungan tersebut bersifat kompleks dan dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti kapasitas armada, kebijakan nasional, kondisi cuaca, perubahan iklim, harga ikan, serta strategi keamanan negara. Dengan formulasi itu, penelitian ini tidak mengklaim secara berlebihan bahwa *“penurunan ikan pasti menyebabkan konflik”*, tetapi menjelaskan bahwa kelangkaan ikan merupakan salah satu kondisi yang meningkatkan insentif dan peluang konflik.

Sekuritisasi Ruang Tangkap

Tema pertama menunjukkan bahwa perikanan di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik. Dalam kawasan dengan klaim yurisdiksi yang tumpang tindih, kapal ikan dapat berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai representasi kehadiran negara di laut. Akibatnya, kegiatan penangkapan ikan, patroli keamanan, dan penegakan hukum maritim kerap berada dalam ruang yang sama.

Bukti kejadian paling jelas terlihat pada Whitsun Reef pada Maret 2021. Pemerintah Filipina melaporkan keberadaan lebih dari 220 kapal Tiongkok di kawasan tersebut. Analisis *Asia Maritime Transparency Initiative* kemudian mengidentifikasi sebagian kapal dan menunjukkan bahwa konsentrasi kapal dalam jumlah besar tersebut terjadi di wilayah yang diperselisihkan. Pemantauan citra satelit oleh lembaga yang sama pada periode September 2021–September 2022 juga menunjukkan bahwa ratusan kapal milisi maritim Tiongkok beroperasi secara berkelanjutan di Kepulauan Spratly; di beberapa lokasi, jumlah kapal tercatat berkisar antara 100 hingga 150 unit.

Temuan tersebut tidak dapat secara otomatis membuktikan bahwa seluruh kapal tersebut menjalankan operasi militer. Namun, keberadaan kapal sipil atau semi-negara secara konsisten dalam jumlah besar di wilayah sengketa menunjukkan adanya proses sekuritisasi ruang tangkap. Ruang perikanan tidak hanya diperebutkan karena nilai

ekonominya, tetapi juga karena kehadiran fisik di laut dapat memperkuat posisi politik dan yurisdiksi suatu negara.

Perspektif ini diperkuat oleh Coutaz (2023), yang menempatkan konflik perikanan sebagai salah satu dimensi penting dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Konflik tersebut tidak hanya bersumber dari klaim wilayah, tetapi juga dari perebutan akses terhadap sumber daya ikan yang semakin terbatas. Oleh sebab itu, pengelolaan konflik perikanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pencegahan eskalasi keamanan dan bukan sekadar persoalan administrasi perikanan.

Secara akademik, Govella (2023) menjelaskan bahwa krisis perikanan Laut Tiongkok Selatan terjadi melalui pertemuan antara kelangkaan sumber daya, kepentingan ekonomi, kejahatan perikanan, dan kompetisi keamanan. Dalam situasi tersebut, sumber daya bersama (*common-pool resources*) dapat dieksploitasi melalui strategi *gray zone*, yaitu tindakan yang berada di antara aktivitas sipil, penegakan hukum, dan operasi keamanan. Govella tidak menyatakan bahwa seluruh aktivitas kapal ikan merupakan strategi negara, tetapi menunjukkan bahwa sektor perikanan dapat menjadi instrumen penting dalam kompetisi geopolitik.

Dengan demikian, hubungan geopolitik → keamanan dalam model penelitian ini dapat dijelaskan melalui mekanisme berikut:

Klaim maritim bertumpang tindih → Peningkatan kehadiran kapal negara dan semi-negara → Sekuritisasi ruang tangkap → Ketidakpastian akses bagi nelayan

Sekuritisasi tersebut bertentangan dengan prinsip *blue economy* yang menuntut ruang laut yang stabil, dapat diprediksi, aman, dan dikelola berdasarkan keberlanjutan sumber daya.

Kerentanan Ekonomi Nelayan

Krisis perikanan memperlihatkan bahwa konflik geopolitik dan degradasi lingkungan saling memperkuat. Ketika negara-negara lebih berfokus pada mempertahankan akses dan kehadiran di laut, koordinasi pengelolaan stok ikan menjadi lebih sulit. Nelayan juga dapat terdorong menangkap ikan lebih banyak karena khawatir akses mereka terhadap suatu wilayah akan dibatasi pada masa depan.

Tema kedua menunjukkan bahwa risiko keamanan di laut dapat berubah menjadi kerentanan ekonomi bagi nelayan. Hubungan ini berlangsung melalui pembatasan akses terhadap daerah tangkap, gangguan logistik dan bantuan perikanan, risiko kerusakan kapal, serta peningkatan biaya operasional.

Dalam konteks Laut Tiongkok Selatan, tekanan ruang tersebut menjadi lebih kompleks karena nelayan tidak hanya bersaing dengan pelaku ekonomi lain, tetapi juga menghadapi batas yurisdiksi yang diperselisihkan. Roszko (2021), melalui studi etnografis dan historis, menunjukkan bahwa nelayan di Laut Tiongkok Selatan dapat bergerak di antara berbagai identitas dan aktivitas ekonomi, seperti nelayan, pedagang, penyelundup, pelaku penangkapan ilegal, maupun aktor yang terkait dengan kepentingan negara. Konsep *occupational slippage* yang diajukan Roszko menggambarkan bahwa nelayan tidak selalu berada dalam kategori ekonomi yang tunggal dan stabil, melainkan harus menyesuaikan strategi hidupnya terhadap perubahan pasar, pengawasan negara, serta dinamika kedaulatan maritim.

Contoh lainnya wilayah di sekitar Scarborough Shoal pada 9 Desember 2023. Menurut pernyataan *National Task Force–West Philippine Sea* dan laporan *Philippine News Agency*, kapal-kapal China Coast Guard dan kapal milisi maritim menghalangi serta menggunakan water cannon terhadap kapal Filipina yang menjalankan misi bantuan bagi nelayan. Kapal

Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BRP *Bankaw*, dilaporkan mengalami sedikitnya delapan kali semburan water cannon dan tiga kali tabrakan. Pemerintah Tiongkok memiliki penjelasan berbeda mengenai legalitas aktivitas kapal Filipina di kawasan tersebut; oleh sebab itu, peristiwa ini harus dibaca sebagai insiden yang diperselisihkan secara hukum, bukan sebagai penetapan tanggung jawab hukum final.

Namun, dampak operasional dari insiden tersebut tetap relevan dalam analisis *Blue economy*. Kapal yang membawa logistik, bantuan, bahan bakar, atau perlindungan bagi nelayan mengalami hambatan untuk menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya. Pada Desember 2024, *Philippine News Agency* juga melaporkan bahwa water cannon dari kapal China Coast Guard mengenai antena navigasi kapal *Bureau of Fisheries and Aquatic Resources* Filipina, BRP *Datu Pagbuaya*, di sekitar Bajo de Masinloc atau Scarborough Shoal. Pada Juni 2025, dua kapal BFAR Filipina, BRP *Datu Tamblot* dan BRP *Datu Taradapit* dilaporkan kembali terkena water cannon di perairan sekitar wilayah yang sama.

Rangkaian insiden tersebut mendukung hubungan keamanan → ekonomi, terutama melalui tiga jalur: (1) Risiko terhadap keselamatan awak dan kapal nelayan. (2) Gangguan terhadap pengiriman logistik dan dukungan pemerintah bagi nelayan. (3) Ketidakpastian akses terhadap daerah tangkap yang produktif.

Bukti peristiwa tersebut diperkuat oleh penelitian Ahn dan Pomeroy (2024). Studi ini mengevaluasi dampak aktivitas armada perikanan jarak jauh terhadap nelayan skala kecil di Laut Tiongkok Selatan dengan menggunakan data empiris mengenai kegiatan armada dan kondisi perikanan lokal. Penelitian tersebut menemukan dampak ekonomi negatif dari meningkatnya aktivitas armada perikanan jarak jauh terhadap nelayan kecil di negara-negara sekitar Laut Tiongkok Selatan. Temuan Ahn dan Pomeroy penting karena memperlihatkan bahwa kompetisi perikanan tidak hanya bersifat abstrak. Ketika armada berkapasitas besar memasuki atau beroperasi secara intensif di ruang yang sama dengan nelayan kecil, nelayan lokal menghadapi tekanan terhadap hasil tangkapan, akses sumber daya, dan pendapatan. Meski demikian, hubungan ini tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati karena hasil tangkapan nelayan dipengaruhi pula oleh musim, kondisi cuaca, harga ikan, alat tangkap, kapasitas kapal, kebijakan domestik, dan perubahan iklim.

Dalam konteks Indonesia, tekanan terhadap ekonomi perikanan dan penegakan hukum terlihat di Laut Natuna Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menyatakan bahwa selama periode 2020–2025 di Kepulauan Riau dan Laut Natuna Utara telah ditangkap 147 kapal perikanan ilegal, terdiri atas 85 kapal Indonesia dan 62 kapal asing. KKP juga memperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp2,1 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan *Blue economy* Indonesia bukan hanya berasal dari kapal asing, tetapi juga dari pelanggaran oleh armada nasional dan kebutuhan memperkuat kepatuhan seluruh pelaku perikanan.

Kompetisi Sumber Daya dan Degradasi Ekosistem

Tema ketiga menegaskan bahwa konflik maritim di Laut Tiongkok Selatan berhubungan erat dengan tekanan terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut. Perikanan merupakan sumber pangan, pekerjaan, dan pendapatan bagi masyarakat pesisir. Namun, kemampuan ekosistem untuk terus menopang kegiatan ekonomi semakin berkurang akibat penangkapan berlebih, IUU fishing, kerusakan habitat, dan lemahnya tata kelola lintas batas.

Teh et al (2017) menunjukkan bahwa tata kelola perikanan di Laut Tiongkok Selatan masih lemah meskipun eksploitasi sumber daya telah menjadi perhatian utama selama beberapa dekade. Studi tersebut mengidentifikasi tekanan dari penangkapan berlebih,

kerusakan habitat, perubahan iklim, dan lemahnya kerja sama antarpihak terhadap keberlanjutan perikanan kawasan.

Bukti historis dari Pauly dan Liang, (2020) memperlihatkan bahwa hasil tangkapan Laut Tiongkok Selatan meningkat pesat hingga mencapai sekitar 10 juta ton per tahun pada 1980-an dan awal 1990-an, tetapi kemudian mengalami stagnasi meskipun tekanan penangkapan terus meningkat. Studi tersebut juga menemukan kecenderungan *fishing down*, yaitu pergeseran tangkapan dari spesies berukuran besar dan memiliki tingkat trofik tinggi menuju spesies yang lebih kecil dan tingkat trofik lebih rendah.

Temuan tersebut penting bagi analisis *Blue economy*. Volume tangkapan yang stabil tidak selalu berarti kondisi perikanan sehat. Sebuah perikanan dapat mempertahankan volume produksi melalui peningkatan jumlah kapal, peningkatan jam tangkap, atau eksploitasi spesies yang lebih kecil, tetapi pola demikian dapat menurunkan daya pulih ekosistem dan nilai ekonomi jangka panjang.

Selain penangkapan berlebih, pembangunan fisik pada terumbu dan pulau kecil memperbesar tekanan ekologis. Wolanski et al (2020) memodelkan dampak reklamasi pulau dan *overfishing* di Kepulauan Spratly terhadap aliran larva. Penelitian tersebut memperkirakan bahwa kedua faktor tersebut dapat mengurangi konektivitas larva di kawasan, sehingga kerusakan habitat di satu lokasi berpotensi memengaruhi pemulihan ekosistem di lokasi lain.

Hubungan ekonomi → ekosistem dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kompetisi armada + *IUU fishing* + peningkatan upaya tangkap → Tekanan terhadap stok dan habitat → Penurunan daya pulih ekosistem → Penurunan produktivitas perikanan jangka panjang

Bukti dari Kemneterian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menguatkan relevansi persoalan *IUU fishing* bagi Indonesia. Pada Januari–Mei 2025, KKP melaporkan pengamanan 34 kapal yang terindikasi melakukan *illegal fishing* secara nasional, dengan 11 kapal ikan asing dan 23 kapal ikan Indonesia. Dalam periode tersebut, dua kapal berbendera Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara karena diduga menggunakan alat tangkap *pair trawl* yang merusak. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem Natuna membutuhkan pengawasan terhadap alat tangkap, bukan hanya pengamanan batas laut.

Umpan Balik Kelangkaan Sumber Daya dan Konflik

Tema keempat memperlihatkan bahwa degradasi ekosistem dapat memperbesar kompetisi geopolitik melalui mekanisme kelangkaan sumber daya. Ketika stok ikan menurun atau hasil tangkapan per unit upaya semakin kecil, nelayan memiliki insentif untuk melaut lebih jauh, meningkatkan waktu operasi, atau memasuki wilayah yang masih produktif. Dalam Laut Tiongkok Selatan, wilayah produktif tersebut sering kali berada di sekitar zona dengan klaim yurisdiksi yang bertumpang tindih.

Dengan demikian, penurunan stok ikan tidak dapat dianggap sebagai penyebab tunggal konflik. Namun, degradasi sumber daya menciptakan kondisi yang meningkatkan kemungkinan konflik karena nelayan, armada industri, dan aparat negara semakin sering bertemu di ruang laut yang sama. Govella (2023) menunjukkan bahwa persoalan perikanan di kawasan merupakan hasil interaksi antara dorongan ekonomi, kelemahan tata kelola, praktik ilegal, dan strategi keamanan negara.

Lingkar umpan balik yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penurunan stok dan kerusakan habitat→Perluasan daerah tangkap→Peningkatan perjumpaan kapal di wilayah sengketa→Tindakan keamanan dan insiden maritim→Menurunnya kepercayaan serta kerja sama perikanan→Tekanan baru terhadap stok ikan.

Dalam konteks ini, kerja sama berbasis prinsip *without prejudice* menjadi penting. Prinsip tersebut memungkinkan negara bekerja sama dalam konservasi, riset kelautan, keselamatan pelayaran, atau pengelolaan perikanan tanpa mengubah posisi hukumnya terhadap sengketa kedaulatan dan delimitasi maritim. *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* atau DOC ASEAN-Tiongkok secara resmi mencantumkan bidang kerja sama yang meliputi perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, keselamatan navigasi, pencarian dan pertolongan, serta pemberantasan kejahatan lintas negara.

Zhang (2018) menawarkan tiga opsi kerja sama perikanan di Laut Tiongkok Selatan: pembentukan kawasan konservasi laut atau *marine peace park*, pengaturan perikanan multilateral, dan pengembangan budidaya laut untuk mengurangi tekanan pada perikanan tangkap. Sementara itu, Hsiao (2020) mengusulkan *provisional measures zone* atau zona tindakan sementara sebagai instrumen pengelolaan dan penegakan hukum perikanan tanpa menunggu penyelesaian penuh terhadap seluruh sengketa batas laut.

Implikasi Pembahasan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *blue economy* di Laut Tiongkok Selatan hanya dapat berjalan apabila keamanan maritim dijalankan sebagai instrumen perlindungan sumber daya, masyarakat pesisir, dan hukum laut; bukan semata-mata sebagai instrumen penguasaan ruang.

Bagi Indonesia, terdapat empat implikasi kebijakan utama: (1) Menegakkan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982, sambil tetap mengedepankan penegakan hukum yang proporsional dan berbasis bukti. (2) Memperkuat nelayan Natuna sebagai pelaku ekonomi biru, melalui pelabuhan perikanan, fasilitas rantai dingin, akses pembiayaan, perlindungan asuransi, pengolahan hasil laut, dan informasi daerah tangkap. (3) Memperkuat pengawasan perikanan berbasis ekosistem, termasuk kepatuhan alat tangkap, pelaporan hasil tangkapan, pemantauan kapal, dan pemberantasan *IUU fishing* yang melibatkan kapal nasional maupun asing. (4) Mendorong kerja sama ASEAN yang bersifat teknis dan tidak mengubah posisi hukum, terutama dalam pertukaran data stok ikan, konservasi daerah pemijahan, komunikasi darurat antarkapal, dan protokol pencegahan insiden.

Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa paradoks *Blue economy* di Laut Tiongkok Selatan bukan sekadar persoalan kurangnya potensi ekonomi laut. Kawasan ini memiliki potensi yang besar, tetapi pemanfaatannya dibatasi oleh konflik yurisdiksi, risiko keamanan, ketimpangan kapasitas perikanan, dan degradasi ekosistem. Tanpa tata kelola perikanan lintas batas yang berbasis hukum, sains, dan perlindungan nelayan, sumber daya laut berisiko terus berubah dari modal pembangunan menjadi sumber konflik.

KESIMPULAN

Paradoks *Blue economy* di Laut Tiongkok Selatan muncul karena kawasan yang memiliki potensi besar untuk perikanan, perdagangan, dan konservasi justru berada dalam situasi ketidakpastian geopolitik dan kompetisi keamanan. Konflik tidak hanya memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga memengaruhi keselamatan nelayan, akses terhadap daerah tangkap, biaya operasi, keberlanjutan stok ikan, serta kesehatan ekosistem laut.

Hubungan geopolitik, keamanan, ekonomi, dan ekosistem membentuk lingkaran umpan balik. Klaim maritim dan persaingan berpengaruh mendorong sekuritisasi ruang laut. Sekuritisasi meningkatkan risiko dan biaya ekonomi nelayan. Tekanan ekonomi serta lemahnya tata kelola bersama mempercepat eksploitasi sumber daya. Penurunan stok ikan kemudian memperbesar kompetisi untuk menguasai ruang tangkap yang produktif. Bagi Indonesia, penguatan ekonomi biru di Laut Natuna Utara harus memadukan perlindungan nelayan, pengawasan *IUU fishing*, penegakan UNCLOS, konservasi ekosistem, pengembangan nilai tambah perikanan, dan diplomasi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, S., & Pomeroy, R. (2024). Evaluating the economic impact of distant water fleet activities on small-scale fishers in the South China Sea. *Marine Policy*, 168, 106324. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106324>
- Association of Southeast Asian Nations. (2002). *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. ASEAN.
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2022, December 13). *The ebb and flow of Beijing's South China Sea militia*. Center for Strategic and International Studies.
- Coutaz, G. (2023). Fishery Conflicts in the South China Sea: The Future Lies in Cooperation. *Tamkang Journal of International Affairs*, 27(1), 1. [https://doi.org/10.6185/TJIA.V.202309_27\(1\).0001](https://doi.org/10.6185/TJIA.V.202309_27(1).0001)
- Fabinyi, M., Wu, A., Lau, S., Mallory, T., Barclay, K., Walsh, K., & Dressler, W. (2021). China's blue economy: A state project of modernisation. *The Journal of Environment & Development*, 30(2), 127–148. <https://doi.org/10.1177/1070496521995872>
- Govella, K. (2023). Avoiding and exploiting the tragedy of the commons: Fishing, crime, and conflict in the South China Sea. *International Politics*, 60, 1294–1314. <https://doi.org/10.1057/s41311-023-00501-4>
- Hsiao, A. (2020). Opportunities for fisheries enforcement cooperation in the South China Sea. *Marine Policy*, 118, 104015. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104015>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025, 21 Juni). *KKP sebut peran aktif masyarakat bantu pemberantasan illegal fishing di Natuna Utara*. Siaran Pers Nomor SP.261/SJ.5/VI/2025.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLoS Medicine*, 18(3), e1003583. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003583>
- Pauly, D., & Liang, C. (2020). The fisheries of the South China Sea: Major trends since 1950. *Marine Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103584>
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea Arbitration: The Republic of*

the Philippines v. The People's Republic of China, Award of 12 July 2016.

- Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., & Koffel, J. B. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
- Roszko, E. (2021). Navigating seas, markets, and sovereignties: Fishers and occupational slippage in the South China Sea. *Anthropological Quarterly*, 94(4), 639–668. <https://doi.org/10.1353/anq.2021.0046>
- Teh, L. S. L., Witter, A., Cheung, W. W. L., Sumaila, U. R., & Yin, X. (2017). What is at stake? Status and threats to South China Sea marine fisheries. *Ambio*, 46(1), 57–72. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0819-0>
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Wolanski, E., Choukroun, S., & Nhan, N. H. (2020). Island building and overfishing in the Spratly Islands archipelago are predicted to decrease larval flow and impact the whole system. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 233, 106545. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecss.2019.106545>
- Zhang, H. (2018). Fisheries cooperation in the South China Sea: Evaluating the options. *Marine Policy*, 89, 67–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.014>